

5 Penutup

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu untuk mengukur dan menganalisa derajat desentralisasi fiskal di 33 provinsi di Indonesia, dan menganalisis pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap penyediaan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari kedua tujuan tersebut, kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini dirangkum menjadi beberapa poin:

1. Secara umum kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan desentralisasi fiskal yang dilihat melalui kemandirian fiskal di Indonesia pada tahun 2011-2019 masih dalam kategori rendah dan sangat rendah. Pada perhitungan derajat desentralisasi fiskal provinsi yang mendapatkan kategori yang baik hanya DKI Jakarta dengan ratio sebesar 68%. Selain adanya provinsi yang mendapatkan kategori cukup, ada juga daerah yang mendapatkan kategori sangat rendah yaitu provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki ratio 4%. Rendahnya derajat desentralisasi fiskal ini mengindikasikan bahwa kemandirian daerah yang dilakukan masih rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal masih kurang maksimal. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi yang ada dimasing-masing daerah sehingga dapat membuat masing-masing daerah dapat tercapainya kemandirian daerah.
2. Penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan melakukan kebijakan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga tidak sesuai dengan teori federalisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal tidak memiliki hubungan signifikan dengan pertumbuhan dikarenakan masih banyaknya daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pusat. Banyaknya daerah yang masih tertinggal membuat derajat desentralisasi fiskal masih belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yang digunakan untuk mencegah perhitungan bias. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel kontrol, seperti: tenaga kerja, investasi, dan *human capital*. Pada penelitian ini variabel investasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk variabel tenaga kerja dan *human capital* tidak mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi pada penelitian ini mempunyai pengaruh, sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen dan solow. Sedangkan untuk tenaga kerja tidak

dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dikarenakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tidak hanya butuh jumlah tenaga kerja tetapi masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti: usia, pendidikan, dan produktivitas. Untuk *human capital* tidak signifikan karena tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan produktivitas yang dihasilkan oleh pekerjaannya, sehingga tidak ada perbedaannya antara orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi atau rendah jika mengerjakan suatu pekerjaan yang sama.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka, saran yang dapat diberikan adalah dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam hal keuangan daerahnya sendiri jangan mengandalkan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk meningkatkan keuangan daerah, daerah dapat ditingkatkan melalui PADnya. Peningkatan PAD dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana transfer untuk pembangunan yang tepat sasaran, seperti mengembangkan komoditi unggulan yang ada di daerah. Diharapkan dengan meningkatnya PAD maka dapat membuat desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Saran untuk penelitian selanjut dapat menggunakan metode perhitungan yang berbeda dalam mengukur desentralisasi fiskal dikarenakan pada metode ini melihat dari sisi kemandirian daerah.

Daftar Pustaka

Abdillah, K., & Mursinto, D. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Ekonomi Antara Daerah Serta Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2010. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tahun XXI*, Vol.24 (3) , 187-197.

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Badan Pusat Statistik*. Retrieved Januari 12, 2021, from Rata-rata Lama Sekolah Menurut Provinsi (Metode Baru), 2010-2019: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2020/02/18/1773/rata-rata-lama-sekolah-menurut-provinsi-metode-baru-2010-2019.html>

Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (n.d.). *Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia (Ribu Jiwa)*. Retrieved Januari 9, 2021, from Badan Pusat statistik Jawa Timur: <https://jatim.bps.go.id/dynamictable/2018/03/08/371/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia-2012---2017-ribu-jiwa-.html>

Badan Pusat Statistik. (2021, Mei 31). *Penduduk Berumur 15 Tahun keatas menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan, 2008-2021*. Retrieved Januari 12, 2021, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/statictable/2016/04/04/1907/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi-dan-jenis-kegiatan-selama-seminggu-yang-lalu-2008---2021.html>

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Statistik Keuangan daerah Provinsi Tahun 2014-2017*. Retrieved Januari 11, 2021, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/19/ca87805ec74d2c852bf2927b/sta>

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2012-2013*. Retrieved Januari 11, 2021, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2014/05/30/741b455795e6b463829b8632/st>

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2016-2017 Buku 1 (Sumatra, Jawa)*. Retrieved Januari 11 2021, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2018/04/19/5ec501731f50b8899346d0ca/sta>

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2016-2017 Buku 2 (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua)*. Retrieved Januari 11, 2021, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2018/04/19/d77837efa97c398b0a8b030c/s>

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2018-2019 Buku 1 (Sumatra, Jawa)*. Retrieved Januari 12, 2021, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/20/31469647ed1a68372d2a8904/statistik-keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2018-2019-buku-1-sumatera-jawa-.html>

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2018-2019 Buku 2 (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua)*. Retrieved Januari 12, 2021, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/20/d2e4c34ec0b4d4bb7b7fb8a8/statistik->

keuangan-pemerintah-kabupaten-kota-2018-2019-buku-2-bali-nusa-tenggara-kalimantan-sulawesi-maluku-dan-papua-.html

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2013-2014*. Retrieved Januari 11, 2021, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2014/05/30/741b455795e6b463829b8632/st>

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2014-2015*. Retrieved Januari 11, 2021, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2016/04/15/c99050fe64a28ec026833abe/sta>

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2017-2020*. Retrieved Juli 11, 2021, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/21/3773650f41abfef7688f6f79/statistik-keuangan-pemerintah-provinsi-2017-2020.html>

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2010-2013*. Retrieved Januari 11, 2021, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2013/12/30/9496a9a7b81ecb6b91f4889f/stat>

Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Tabel Dinamis Subjek Produk Domestik Bruto (Pengeluaran)*. Retrieved Januari 12, 2021, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/subject/169/produk-domestik-bruto--pengeluaran-.html#subjekViewTab5>

Badrudin, R., & Baldric, S. (2015). The Evaluation of the Implementation of Regional Autonomy in Indonesia. *economic Journal of Emerging Market, Vol.7(1)* , 1-11.

Bahl, R. W., & Linn, J. (1992). *Urban Public Finance in Developing Countries*. New York : New York Oxpord University Press.

Bappenas. (2007). *Laporan Pencapaian Millenium Development Goals Tahun 2007*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Barro, R. J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth. *Journal of Political Economy, Vol.98(S5)* , 103-125.

Barzelay, M. (1991). Managing Local Development: Lesson from Spain. *Policy Sciences Vol.24(1)* , 271-290.

Baskaran, T., & Feld, L. P. (2009). Fiscal Decentralization and Economic Growth in OECD Countries: Is there a Relationship? *Cesifo Working Paper No.2721* .

Depkeu. (2009). *Nota Keuangan dan RAPBN 2010*. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Desita, P. N. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pekanbaru (2010-2014). *Jom Fekon Vol.2(2)* , 1-13.

Djojohadikusumo, S. (1993). *Perkembangan Pemikiran ekonomi: dasar teori ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

- Ginting, A. M., Hamzah, Z. M., & Sofilda, E. (2019). The impact of fiscal decentralization on economic growth in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets, Vol.11(2)* , 152-160.
- Grossman, G., & Helpman, E. (1991). Trade, Knowledge Spillover and Growth. *European Economic Review, Vol.35(2)* , 517-526.
- Harliyani, E. M., & Haryadi. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol.3(3)* , 129-140.
- Hayek, V. F. (1945). The Use of Knowledge in Society. *American Economic Review, Vol.35(4)* , 519-530.
- Jogiyanto. (2003). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Kuangan, K. K. (2016, July 1). *APBN-P 2016: Kali Pertama Jumlah Transfer ke Daerah Lebih Besar dari Belanja Kementerian/Lembaga*. Retrieved Januari 8, 2021, from Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=3479>
- Kusuma, M. W., & Badrudin, R. (2016). Fiscal decentralization effect on economic growth in Bali. *Economic Journal of Emerging Market, Vol.8(2)* , 136-147.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makroekonomi, Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Miri, M., Taacha, E. H., & Benatia, M. A. (2017). Fiscal Decentralization and Economic Growth in Morocco: A Panel Cointegration Analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues, Vol.7(6)* , 192-201.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature, Vol.37(3)* , 1120-1149.
- Oates, W. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal, Vol.46(2)* , 237-243.
- Philips, K., & Woller, G. M. (1998). Fiscal decentralisation and IDC economic growth: An empirical investigation. *The Journal of Development Studies Vol.34(4)* , 189-198.
- Prud'homme, R. (1995). The Danger of Decentralization. *The World Bank Research Observer, Vol.10(2)* , 201-220.
- Purnamasari, S. A., Rostin, & Ernawati. (2017). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Vol.2(2)* , 1-14.
- Romer, D. (1996). *Advanced Macroeconomics*. New York: McGraw-Hill inc.

- Sabilla, K., & Jaya, W. K. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol.15(1)* , 12-22.
- Sasana, H. (2006). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Dinamika Pembangunan, Vol.3(2)* , 145-170.
- SBM, N. (2014). Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *MEDIA EKONOMI DAN MANAJEMEN, Vol.29(2)* , 195-202.
- Siddik, M. (2009). “Kebijakan Awal Desentralisasi Fiskal 1999-2004”. In A. Abimanyu, & A. Megantara, “*Era Baru Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep dan Implementasi*” (pp. 539-560). Jakarta: Kompas.
- Sidig, D. S. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Pendapatan antar Provinsi di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara, vol.1(1)* . , 978-1001.
- Sukirno, S. (2002). *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: P.T.Rajawali Grafindo Persada.
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.3(1)* , 29-50.
- Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditure. *Journal of Political Economy, Vol.64(5)* , 416-424.
- Wibowo, P. (2008). Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Public Vol.5(1)* , 55-83.
- Widayati, H. W., Laut, L. T., & Destiningsih, R. (2019). Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 1996-2017. *DINAMIC : Directory Journal of Economic, Vol.1(2)* , 182-194.
- Wijaya, D., Haryadi, & Zulgani. (2015). Analisis Tingkat Ketergantungan Fiskal dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3(1)* , 11-18.
- Xie, D., Zou, H., & Davoodi, H. (1998). Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States. *Journal of Urban Economics, Vol.45(2)* , 228-239.
- Zhang, T., & Zou, H. F. (1998). Fiscal decentralization, public spending, and economic growth in China. *Journal of Public Economics, Vol.67(2)* , 221-240.